BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang dan era globalisasi yang tidak mengenal batas suatu negara menuntut di temukannya teknologi terbaru yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses ilmu, informasi maupun barang baru untuk gaya hidup dan kebutuhan yang diinginkan secara mudah dan modern dengan sentuhan membuka teknologi informasi berbasis jaringan internet, namun perlu diantisipasi dengan payung hukum terhadap penemuan-penemuan teknologi berbasis jaringan internet dan computer tersebut. Diiringi kemajuan teknologi Informasi, komunikasi dan transportasi modern, telah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap tata hubungan antar manusia maupun manusia dengan lingkungannya.¹ Kemajuan di bidang telekomunikasi yang ditandai semakin maraknya internet dan multimedia, menjadikan hampir setiap kegiatan dan aktifitas kehidupan manusia terkoneksi secara elektronik melalui *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-market*, *e-style* dan lain sebagainya.²

Kemajuan di bidang telekomunikasi yang menyebabkan kehidupan manusia terkoneksi secara elektronik dan yang pastinya penggunaan internet juga sangat tinggi. Kondisi tersebut di seluruh dunia telah terjadi tidak terkecuali di Indonesia, menyebabkan perusahaan-perusahaan atau korporasi bersaing dan berlomba untuk menjadi perusahaan di bidang teknologi telekomunikasi terbaik, untuk itu terjadi persaingan dalam berbagai aspek, yakni: perbaikan signal di

¹ Andi Nirwanto, *Asas Kekhusuan Sistematis bersyarat dalam hukum pidana administrasi dan tindak pidana korupsi*, (Bandung: PT. Alumni,), hlm. 1.

² *Ibid.* 2015

seluruh wilayah pelosok nusantara diperbaiki, persaingan dalam penentuan tarif rendah untuk biaya sms, internet, bahkan tarif telepon, yang juga menjadi point penting yang akan penulis soroti adalah terkait dengan persaingan dalam perkembangan pemasangan jaringan.

Meskipun persaingan dan perkembangan yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya sangatlah ketat bisnis di bidang telekomunikasi cukuplah banyak menarik Pihak untuk berbisnis di bidang tersebut yaitu dengan banyak Korporasi Indonesia yang bergerak di bidang Telekomunikasi khususnya sebagai *provider*.³ *Provider* telekomunikasi di Indonesia cukup banyak yaitu Indosat, Telkomsel, Telkom, Three, Axis, XL, dan sebagainya. Namun juga *provider* di Indonesia pun yang akhirnya gulung tikar yaitu Axis, kebangkrutan Esia dikarenakan banyak faktor yaitu mulai dari persaingan antar *provider* lain, budget yang cukup besar atas operasional dari jalannya perusahaan telekomunikasi.

Salah satu budget yang besar dalam operasional adalah perijinan penggunaan frekuensi radio. Terdapat korporasi yang melakukan pemangkas biaya dan birokrasi perijinan penggunaan frekuensi radio. Hal yang dilakukan korporasi tersebut merupakan tindak pidana, artinya korporasi tersebut melakukan tindak pidana.

Korporasi yang melakukan hal tersebut merupakan kasus hukum menjerat PT. Indosat Mega Media (selanjutnya disebut PT.IM2) adalah salah

³ Definisi provider adalah sebuah perusahaan penyedia layanan pada jasa sambungan internet dengan jasa lainnya yang saling berhubungan. ISP ini memiliki infrastruktur sebagai sarana telekomunikasi yang terkoneksi pada internet. ISP akan membagi kapasitas koneksi pada internet yang dimilikinya untuk para pelanggannya yang membutuhkan jasa internet. Biasanya sistem langganan telah ditetapkan dahulu ketentuannya. Sistem langganan ini pembayarannya tiap bulan. Ada juga provider telekomunikasi lainnya yang menerapkan sistem langganan dengan mrnggunakan sistem yang berbasis quota. <http://www.miung.com/2017/01/pengertian-internet-service-provider.html>, diakses pada tanggal 20 April 2017.

satu kasus korupsi yang menarik untuk dibahas dalam kajian akademis. Kasus ini berawal setelah PT.IM2 selaku penyelenggara jasa akses internet (Internet Service Provider) melakukan kerja sama dengan PT. Indosat terkait dengan Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. Kerjasama itu ditandatangani pada 24 November 2006 dengan Nomor Indosat: 224/E00-EA.A/MKT/06 dan Nomor IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 yang ditandatangani oleh Indar Atmanto selaku Direktur Utama IM2 dan Kaizad B Heerjee selaku Wakil Direktur Indosat.

Sebelum melakukan kerjasama, PT Indosat Mega Media (IM2) telah diberi izin oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa akses internet (ISP) melalui keputusan No. 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006.

Pada 2011, Denny AK Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) membuat laporan kepada Isnur, S.H. seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang Jawa barat. Dalam laporannya Denny AK menyebutkan akibat perjanjian kerjasama PT. Indosat dengan IM2 terkait dengan Akses Internet Broadband Melalui jaringan 3G telah mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp. 3.834.009.736.400 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh empat milyar Sembilan juta). Atas laporan Denny AK, tanggal 17 Oktober 2011 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengirimkan surat panggilan kepada Indar Atmanto atas nama Direktur Utama PT IM2 untuk dimintai keterangan. Sejumlah orang juga dimintai keterangan termasuk pejabat Kemenkominfo dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dari serangkaian pemeriksaan di Kejati Jawa barat, maka pada tanggal 13 Januari 2012, dikeluarkan surat bahwa tidak ada kasus pidana korupsi sebagaimana yang dilaporkan oleh Denny AK.⁴

⁴ <http://mencari-keadilan.com/kronologi-kasus-im2-vs-jaksa-agung/> diakses pada

Pada tanggal 18 Januari 2012, Kejaksaan Agung memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka Indar Atmanto Direktur Utama IM2. Penyidikan tersebut dilakukan atas dasar adanya laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian negara. Proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung ini dilakukan dengan alasan bahwa kasus ini berskala nasional.

Perbuatan Indar Atmanto yang dipersalahkan adalah tindakan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media ("IM2") tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 224/E00-EAA/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/IMM/XI/06 ditandatangani tanggal 24 November 2006. Perjanjian Kerja Sama ini adalah berkaitan dengan pemanfaatan jaringan seluler Indosat sebagai koneksi akses layanan internet (broadband) yang layanannya disediakan oleh PT IM2 yang dikenal masyarakat sebagai ISP (Internet Service Provider).⁵

Menurut Penuntut Umum PT. IM2 selaku penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagai mana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2001 Tentang penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan membangun jaringan untuk disewakan.

Karena adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Herri Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat dalam menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik PT. Indosat, maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan

tanggal 21 April 2017

⁵ <http://nasional.kontan.co.id/news/ini-kronologi-dugaan-korupsi-indosat-dan-im2> diakses pada 21 April 2017

voucher isi ulang milik PT. Indosat untuk layanan internet prabaray IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2.

Menurut Penuntut Umum, Terdakwa selaku Direktur Utama IM2 telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular yang menyatakan *“Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.”* Dan dianggap bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit yang menyatakan bahwa pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

Selanjutnya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Indar Atmanto menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular yang menyatakan *“Penggunaan jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut:*

ayat (1) “penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi sebagai berikut:

a. Biaya nilai awal (up front free)

1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan,

biaya nilai awal (up front fee) sebesar 2 x nilai penawaran akhir dari setiap pemenang lelang

2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular pada pita frekuensi radio 2.1 GHz yang memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak selular, biaya awal (up front free) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang

b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam peraturan ini.”

Ayat (2) “Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak selular pada frekuensi 2.1 GHz moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut:

a. Membayar biaya hak penyelenggara (BHP) Telekomunikasi

b. Membayar Biaya Kontribusi kewajiban pelayanan universal (Universal Service Obligation)”

Dalam dakwaannya, Indar Atmanto juga disebutkan menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT IM2 bersama dengan PT Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2.1GHz milik PT Indosat yang bertentangan dengan Pasal 30 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelitnya yang menyatakan “Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna.”

Indar Atmanto didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal

18 ayat (1), (3) UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; dan dakwaan subsidier Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (3) UU PTPK Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana⁶. Berdasarkan pemeriksaan persidangan, Penuntut Umum menyatakan dakwaan primer terbukti dan menuntut: (1). Terdakwa Indar Atmanto bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal perbuatan terdakwa diancam dengan Dakwaan Primer; (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan, dan membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,-, subsidier 6 bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di rutan; dan (3). Uang pengganti sebesar Rp. Rp. 1.358.343.346.674 dibebankan kepada PT. Indosat dan PT IM2 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah.

Begitupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta selatan menyatakan Indar Atmanto bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, menghukum Indar Atmanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Menghukum PT. IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 paling lama dalam waktu satu tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Pada tanggal 12 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan Putusan Tingkat banding yang intinya menyatakan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 8 Juli 2013, sehingga amarnya berbunyi; (1). Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dilakukan secara

⁶ Lebih lanjut baca dalam Surat dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, No. Reg. Perk: PDS-23/JKT-SL/12/2012

⁷ Lebih lanjut baca dalam Putusan No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PST

bersama-sama”; dan (2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 Tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa PT. IM2 tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membayar ganti rugi, karena PT.IM2 tidak pernah didakwa. Pada 10 Juli 2014 Majelis Kasasi Tingkat Mahkamah Agung memutuskan Permintaan Kasasi dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Indar Atmanto, dan menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama” sebagai mana dakwaan primer, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 Tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum PT. IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 dengan ketentuan apabila PT. IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambang 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT.IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Perbuatan pada kasus diatas merupakan kejahatan korporasi. Definisi kejahatan korporasi menurut simpson dengan mengutip pendapat John Braithwaite, mendefinisikan korporasi sebagai “*conduct of corporation, or employess acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”.⁸ Kejahatan atau tindak pidana korporasi dikenal juga sebagai kejahatan

⁸ Zulkarnain, *Pembaruan Criminal Policy Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Guna Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Upaya Harmonisasi Politik Hukum Pidana Dan Politik Hukum Ekonomi)*, Dalam: *Problematika Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif*, (Jakarta: Komisi Nasional Republik Indonesia, 2011), hlm. 130.

bisnis. Kejahatan atau tindak pidana korporasi selalu dilakukan dalam skala besar (*big business*). Oleh karenanya, besarnya keuntungan yang diperoleh oleh korporasi akan berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang diderita korban (masyarakat, negara, lingkungan, sistem ekonomi dunia dan lain sebagainya) sebagai akibat tindak pidana korporasi tersebut.

Disamping sebagai kejahatan bisnis, kejahatan korporasi juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh para eksekutif bisnis, para profesional. Oleh karena itu yang membedakan dengan kejahatan pada umumnya adalah cara melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Singkatnya, kejahatan korporasi dilakukan tidak dengan kekerasan kepada korbannya sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian fisik pada korban.⁹

Hal penting kedua yang perlu diperhatikan dari pengertian kejahatan korporasi seperti yang dikemukakan oleh Ron Kramer adalah berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab. Dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan korporasi maka yang harus bertanggungjawab menurut Ron Kramer adalah orang-orang yang menempati posisi sebagai eksekutif dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban (termasuk pertanggungjawaban pidana) difokuskan kepada korporasi dan pejabat yang mengambil kebijakan pada korporasi tersebut (bukan pada individu yang ada pada korporasi).¹⁰ Direktur, komisaris, dan pemegang saham termasuk di dalam korporasi tersebut.

⁹ <http://lotzemosley.com/faqs/washington-dc-corporate-crime/> diakses terakhir pada hari jumat tanggal 21 April 2017 pukul 08.16

¹⁰ Ronal Regan, *The United States Will Not Submit itself To The Rulings of The World Court*, diakses dari: http://www.thirdworldtraveler.com/Nader/MegacorpWorldReagen_RNR.html. Diakses terakhir pada hari jumat 21 April 2017 pukul 09.15

Namun demikian, perlu dikemukakan kembali pada bagian ini bahwa tindak pidana atau kejahatan korporasi baik di Indonesia maupun dinegara lain sangat jarang dilaporkan. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada aplikasi dan eksekusi dalam meminta pertanggungjawaban (khususnya pertanggungjawaban pidana) kepada suatu korporasi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Di Amerika Serikat misalnya, FBI sampai tahun 1979 tidak pernah menerbitkan statistik kejahatan korporasi dalam laporan kejahatannya. Demikian pula dalam pertemuan tahunan *American Criminological Society* di Amerika Serikat, sampai tahun 1979, kejahatan korporasi jarang dibahas dalam pertemuan tersebut.¹¹

Di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut:¹²

1. *Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).
2. *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
3. *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).
4. *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
5. *Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).

¹¹ Edward, "Did you ever expect a corporation to act morally when it has no soul to be damned and no body to be kicked?". Diakses dari <http://www.critcrim.org/redfeather/crime/005corporate>. Html pada hari sabtu 22 April 2017 pukul 01.15

¹²

6. *Illegal intervention in the political process*, yaitu *intervensi ilegal* dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang *ilegal*).

Pada kasus Hukum yang dilakukan PT. IM2 dengan PT. Indosat merupakan kejahatan korporasi yang jelas merugikan negara, artinya ketika negara rugi atas perbuatan PT IM2 dengan PT. Indosat maka kesejahteraan umum masyarakat dibahayakan.

Dalam kejahatan korporasi timbul suatu pertanyaan siapa yang bertanggung jawab ketika korporasi melakukan suatu kejahatan maupun tindak pidana, dikarenakan dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana Korporasi bukan merupakan Subjek Hukum. Pada mulanya, subyek hukum pidana hanya *naturlijke persoon*, sedangkan korporasi/*recht persoon* tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Hal ini karena diberlakukannya asas *universtas delinquere non potest*.¹³ Namun, kemungkinan adanya pemidanaan terhadap korporasi didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar teoritis juga dibenarkan.¹⁴

Dijadikannya korporasi sebagai subyek hukum pidana bukanlah hal baru, sebab sejak dahulu menurut Maine, korporasi sudah menjadi subyek hukum pidana. Bahkan di Indonesia dahulu desa sebagai korporasi juga dikenai pidana denda. Sahetapy¹⁵ menilai bahwa mereka yang menolak korporasi sebagai subyek hukum pidana, karena berpendirian bahwa korporasi adalah “*persona ficta*” (subyek/manusia fiksi), dapatlah dibenarkan. Namun, apabila diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi, maka gerak-gerik korporasi tersebut harus dikendalikan oleh hukum, dan apabila menyimpang, maka korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana lahir

¹³ Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55.

¹⁴ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 11.

¹⁵ Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 32

dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.¹⁶

Dalam permasalahan korporasi tersebut perlu dikaji atas siapa yang bertanggung jawab ketika korporasi melakukan tindak pidana dikarenakan payung hukum dan secara teoritis masih belumlah jelas.

Kemudian dalam penanganan kasus hukum PT. IM2 dan PT. Indosat dalam penyelesaiannya ketika lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memperjelas siapa yang bertanggung jawab, maka dari ini perlu dikaji.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mencoba merangkum, memaparkan dan memberikan suatu gambaran penelitian secara komprehensif dengan judul **Tesis : “Penerapan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Penyalahgunaan Jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) (Suatu Tinjauan Kasus Putusan PN. JAKSEL No: 001/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT)”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PT. Indosat Mega Media (IM2) dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana korporasinya terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat?
2. Siapa sajakah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) dari perspektif Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun

¹⁶ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 30

2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi?

3. Bagaimana sistem pertanggungjawaban korporasi ditinjau dari Konvensi Internasional?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan gambaran terkait dengan pertanggungjawabannya terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2). Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus agar dapat memberikan gambaran secara lebih operasional dan terinci, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah PT. Indosat Mega Media (IM2) dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat;
2. Untuk mengkaji Siapa sajakah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) dari perspektif Peraturan MA (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi;
3. Untuk mengkaji bagaimana sistem pertanggungjawaban korporasi ditinjau dari Konvensi Internasional;

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu terdiri 2 (dua) manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dalam penelitian ini mengkaji korporasi yang melakukan tindak

pidana serta segi tanggung jawabnya menggunakan payung hukum Indonesia dan perbandingan dengan beberapa negara atas proses pertanggung jawaban korporasi ketika melakukan tindak pidana. Dalam hal ini memberikan manfaat ilmu pengetahuan hukum.

- b. Manfaat Praktis, dalam pengkajian penelitian ini dapat memberi masukan kepada lembaga negara terkait ketika terjadi kasus hukum korporasi yang melakukan tindak pidana.

I.5. Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan memecahkan rumusan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan kerangka teoritis meliputi teori perjanjian, teori hak subrogasi, teori perbuatan melawan hukum, dan teori putusan.

a. Teori Korporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, “Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹⁷

¹⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum*

Sedangkan apabila dilihat secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”.¹⁸

Terkait dengan istilah “*corporatio*” ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno:

Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan “tio” maka “*corporatio*” dianggap sebagai kata benda (substantivum) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “badan” atau dapat disimpulkan bahwa *corporatio* dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁹

Menurut Garner dan Bryan A, mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.⁸ Dilain kesempatan, Kenneth S. Ferber dalam bukunya *Corporation Law* menyatakan bahwa:²⁰

A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal. (korporasi adalah orang buatan. Korporasi dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia. Korporasi dapat membeli dan menjual properti, baik yang nyata

Pidana, (Bandung: STHB, 1991), hlm. 13.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kenneth S. Ferber, “*Corporation Law*”, *Prentice Hall*, 2002, hlm. 18

²⁰ Garner, Bryan A., (Ed.), “*Black’s Law Dictionary*”, Second Pocket Edition, (tanpa kota, tanpa penerbit, 2003), hlm. 147

secara pribadi dan atas namanya sendiri. Hal ini menyebabkan korporasi dapat menuntut dan dituntut secara resmi atas namanya sendiri).

Mengenai hakekat dari korporasi itu sendiri pada dasarnya dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C., yang menyatakan bahwa:

Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen atau wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, yaitu ego dan pusat korporasi.²¹

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah

Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.²² Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Beliau menyatakan bahwa:

Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" korporasi. Suatu korporasi hanya mati

²¹ Peter Gillies (Penyunting: Barda Nawawi Arief), "*Criminal Law*", (Tanpa kota, tanpa penerbit, 1990), page. 126

²² Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.13.

secara hukum apabila matinyal korporasi itu diakui oleh hukum.²³

Sedangkan secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, beliau mendefinisikan korporasi sebagai berikut: “Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.²⁴

Hampir senada dengan pendapat Sutan Remi Sjahdeini diatas, menurut Loebby Loqman, dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana mengenai korporasi, berkembang 2 (dua) pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi itu? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi, dalam hal ini hanya dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang telah berbadan hukum. Adapun alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama ini bahwa dengan berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat

²³ Sutan Remy Sjahdeini, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 44.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

dipertanggungjawabkan secara pidana.²⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁶ Korporasi yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Teori Kejahatan Korporasi

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:²⁷

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap

²⁵ Loebby Loqman, "Kapita Selektta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian", (Jakarta, Datacom, 2002), hlm. 32.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

²⁷ Hamzah Hatrik, "Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (*Strict Liability dan Vicarious Liability*)", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 41.

korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

c. Tanggung Jawab Pidana

1. Tanggung Jawab Pidana Secara Umum

Membahas masalah pertanggung jawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2). Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3). Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);.

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana.

Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.²⁸ Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan

²⁸ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 30

pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).²⁹

Secara prinsipil, antara penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. Hanya saja bagi yang berpandangan monoistis seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.³⁰ Aliran Dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan). Dalam hal ini aliran dualistis memandang meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus Korporasi Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,

²⁹ Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40

³⁰ Arief Amrullah, "Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)", (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 133.

tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.³¹

Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ketika sebagai berikut:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.³²

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi³³, pertanggungjawaban tersebut berlaku ketika tindak pidana dilakukan ketika dalam masa kepengurusan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pertanggungjawaban grup korporasi dalam hal tindak pidana dilakukan

³¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 *Op.Cit.*, Pasal 3

³² *Ibid*, Pasal 4

³³ *Ibid*, Pasal 5

oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.³⁴

Dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan, Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.³⁵

d. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum merupakan gagasan modern dan selalu aktual dalam ketatanegaraan. Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Menurut Oemar Seno Adji dalam Indonesia Negara Hukum adalah

“bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori *Rechtsstaat* yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan

³⁴ *Ibid*, Pasal 6

³⁵ *Ibid*, Pasal 7

undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori *Rule of Law* yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya.”³⁶

Tradisi besar negara hukum di dunia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu negara hukum dalam tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *Rule of Law*. Menurut Wolfgang Friedmann, gagasan Negara Hukum tidak selalu identik dengan *Rule of Law*. Sedangkan istilah *Rechtsstaat* mengandung pengertian adanya pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.³⁷ Negara hukum berawal dari abad ke-18 yang dipelopori oleh Immanuel Kant yang mengidealkan paham *laissez faire laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachersstaat*). Dalam gagasan ini setiap warga negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan-urusan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat. Negara cukup berfungsi sebagai penjaga pada malam hari yang melindungi seluruh rakyat agar tetap merasa aman dan hidup tenteram.³⁸

Konsep negara hukum Emanuel Kant diperbaiki oleh Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang sering dirujuk pendapatnya terkait negara hukum.³⁹ Unsur-unsur yang harus ada dalam *Rechtsstaat*

³⁶Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.11

³⁷Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (London: Steven & Son Limited, 1960), hlm. 456.

³⁸Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90.

³⁹Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co,

adalah pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); kedua, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*).⁴⁰

Unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law* adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*); ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).⁴¹ Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional; kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; ketiga, pemilihan umum yang bebas; keempat, kebebasan menyatakan pendapat; kelima, kebebasan berserikat dan berposisi; dan keenam, pendidikan kewarganegaraan.⁴² Keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut.⁴³

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu

Pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat,

1989), hlm. 30.

⁴⁰Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 11

⁴¹A.V. Dicey, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971), hlm. 223-224.

⁴²South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, (Bangkok: International Commission of Jurist, 1965), hlm. 39-45.

⁴³Tim Peneliti Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 12

adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.⁴⁴

Franz Magnis-Suseno memberikan catatan khusus berkaitan dengan ciri adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Menurutnya bahwa:

Dengan adanya asas kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak-hak asasi manusia oleh penguasa, karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsinya tersebut.⁴⁵

Menurut Adrian W. Bedner, walaupun di berbagai Negara mempunyai konsepsi yang berbeda tentang Negara hukum, namun hampir semua sepakat bahwa Negara hukum memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu: pertama, membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak semestinya dari kekuasaan Negara atau dengan kata lain kedaulatan dibatasi oleh hukum dan kedua melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.

⁴⁴Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 298-301.

⁴⁵*Ibid.*

Berpijak dari kedua fungsi tersebut, Pendapat Adrian W.Bedner mengenai elemen-elemen Negara hukum per-kategori, khususnya untuk mendukung fungsi kedua, sebagai berikut:

1. Kategori pertama adalah Elemen Prosedural, meliputi:
 - a. Pemerintahan dengan Hukum (*Rule of Law*);
 - b. Tidakan Negara harus tunduk pada hukum;
 - c. Legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan dapat diprediksi pokok perkaranya serta diterapkan pada semua orang)
 - d. Demokrasi (persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum).
2. Kategori kedua adalah Elemen Substantifl, meliputi:
 - a. Subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan;
 - b. Perlindungan hak asasi dan kebebasan perseorangan;
 - c. Pemajuan Hak asasi sosial;
 - d. Perlindungan hak kelompok.
3. Kategori ketiga adalah Elemen Mekanisme Kontrol (lembaga-lembaga Negara pengawal hukum), meliputi:
 - a. Lembaga peradilan yang independen (terkadang diperluas menjadi trias politika);
 - b. Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen Negara hukum.⁴⁶

⁴⁶ Waluyo, Bambang, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2016), hal. 23-24.

I.6. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

Pengertian penerpan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menerapkan dan perihal mempraktikkan⁴⁷

b. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran pertama adalah aliran monoistis yang memandang bahwa di dalam tindak pidana terkandung juga pertanggungjawaban. Salah satu penganut aliran ini adalah Simons. Simons merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah: 1). Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); 2). Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*); 3). Melawan hukum (*onrechtmatig*); 4). Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);.

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons tersebut terlihat di dalam rumusan tindak pidana telah terkandung masalah pertanggungjawaban pidana.

Aliran kedua adalah aliran dualistis. Penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya masalah pertanggungggjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁴⁸ Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moeljatno yang memisahkan pengertian perbuatan

⁴⁷ <http://kbbi.web.id>, diakses 23 Januari 2017.

⁴⁸ Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 30

pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).⁴⁹

c. Korporasi

Jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁰

1. Korporasi Publik

Korporasi publik adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan public. Contohnya di Indonesia seperti Pemerintahan Kabupaten atau Kota.

2. Korporasi Privat

Korporasi privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industry, perdagangan. Korporasi Privat ini sahamnya dapat di jual ke masyarakat, maka penyebutannya ditambah dengan istilah "public". Contoh di Indonesia: PT. Garuda TBK, dan lain sebagainya. Pencantuman "TBK" (terbuka) di sini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah "go public" atau sahamnya telah dijual ke masyarakat melalui bursa saham.

d. Korporasi Quasi Publik

Korporasi quasi public lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (public services). Contohnya di Indonesia adalah PT. Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Perusahaan Daerah Air Minum, dan sebagainya.

e. Penyalahgunaan

Definisi Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan;

⁴⁹ Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40

⁵⁰ Kristian, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari berbagai konvensi Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 74-75.

penyelewengan: kekayaan yg diperolehnya adalah hasil – jabatannya.⁵¹

f. Jaringan 3G

Jaringan 3G (third-generation technology) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) yang diadopsi dari IMT-2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ke-tiga.⁵²

I.7. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier⁵³. Dalam tesis ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Pertaraun Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi.

Selain itu, bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Literatur-literatur atau buku-buku hukum (*Text books*) yang berkaitan dengan korporasi serta tindak pidana di Indonesia. Bahan tersier sebagai berikut:

1. Kamus; dan
2. Ensiklopedi hukum.

Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis data

⁵¹ <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>, diakses tanggal 21 April 2017.

⁵² <https://wearecomeone.wordpress.com/2015/04/08/sejarah-perkembangan-teknologi-3g/>, diakses tanggal 21 April 2017.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁵⁴.

I.8. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

(BAB I) PENDAHULUAN

Bab I dalam penulisan tesis ini berisikan *Latar Belakang*, yang dengan singkat mengulas pentingnya penelitian dilakukan, serta memberi gambaran secara umum tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dengan hal yang semestinya berjalan.

Perumusan Masalah, berisikan rumusan masalah yang diawali dengan kalimat pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi dan memberi batasan tentang hal-hal yang akan dijawab atau ingin diketahui dalam penelitian dan penulisan tesis ini sehingga dengan adanya perumusan masalah di harapkan pembahasan dalam tesis ini tidak melebar dan keluar dari tema sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil maksimal dalam meneliti fenomena yang terjadi.

Tujuan Penelitian, berisikan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan mengawali kalimat “untuk mengetahui tentang permasalahan tersebut”. Tujuan Penelitian merupakan upaya atau sesuatu yang ingin dituju dan didapat untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada dan timbul dari hasil penelitian serta penulisan tesis ini.

⁵⁴. Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006), hlm. 250

Manfaat Penelitian, berisikan manfaat dari penelitian dan penulisan tesis ini. Manfaat penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan.

Kerangka Teoritis, berisikan teori hukum terkait Teori Korporasi, Teori Kejahatan Korporasi, Teori Tanggung Jawab Pidana, Teori Negara Hukum

Sistematika Penulisan yaitu gambaran singkat dan praktis mengenai isi semua BAB yang ada dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Tinjauan pustaka dalam penulisan tesis ini memuat tinjauan dan ulasan singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan yang mendasari penelitian. Penulis berupaya menggunakan teori-teori pustaka yang relevan, serta data-data terbaru demi menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat dan mampu menjawab fenomena kekinian yang terjadi di bidang hukum terutama hukum korporasi. Hukum pidana korporasi yang terkait dengan telekomunikasi ini adalah salah satu hukum yang berkaitan erat dengan kondisi kemajuan suatu bangsa dibidang telekomunikasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara tegaknya hukum pidana korporasi suatu bangsa maka tidak dapat lepas dari hukum pembangunan nasional yang berujung pada terciptanya suatu tujuan negara yakni pemerataan akses komunikasi di seluruh wilayah demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III (METODE PENELITIAN)

Metode penelitian merupakan kerangka pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode eksperimen atau kombinasi. Metode penelitian berguna untuk membantu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk

mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

BAB IV (ANALISIS DAN PEMBAHASAN)

Analisis yang dimaksudkan dalam penelitian dan penulisan Tesis ini adalah cara atau yang dilakukan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang diungkapkan dalam pendahuluan. Penggabungan analisis dan pembahasan bergantung pada keadaan data dan kedalaman pembahasannya. Analisis dan pembahasan merupakan salah satu cara untuk mencocokkan hasil utama dan tujuan utama, selain itu argumentasi juga akan dituangkan dalam bab analisis dan pembahasan ini karena berkaitan dengan relevansi serta manfaat bagi penelitian dan penulisan tesis.

BAB V (PENUTUP)

1. *Kesimpulan*, memuat hasil ringkasan penelitian yang menjawab permasalahan. Kesimpulan merupakan ringkasan yang mudah untuk dibaca dan tidak menimbulkan penafsiran lain.
2. *Saran*, berisi saran yang telah disesuaikan dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan tesis.